HADIS LARANGAN MEMINTA JABATAN: ANALISIS KUALITAS DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH

Yulia Pratami Putri [1], Oldha Fauzia[2]
[1,2]Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang
[1]yuliapratamiputri13@gmail.com , [2]oldhafauziah@gmail.com

ABSTRACT

This research investigates the authenticity of the hadith concerning the prohibition of seeking a position of leadership and its relevance to Ibn Taymiyyah's thought. In the context of religious life, Islam as a teaching that regulates all aspects of life, including governance, provides ethical and moral guidelines for individuals involved in the bureaucratic world. In this context, the act of seeking certain positions has a significant impact on the effectiveness and sustainability of governance. This research uses a qualitative method with a type of library research. This study concludes the status of the hadith about the prohibition of seeking positions narrated by At-Tirmidhi in the Sunan At-Tirmidhi book number 7146 in terms of its transmission; this hadith is classified as Marfu' because it originates from the transmission of the Prophet Muhammad (SAW). Then, if viewed from the criteria of the authenticity of a hadith, this hadith meets the five criteria of authenticity. Therefore, the hadith narrated by At-Tirmidhi is considered authentic and can be used as evidence. In relation to Ibn Taymiyyah's thoughts, seeking positions is prohibited. According to Ibn Taymiyyah, a leader must be chosen based on competence, honesty, and integrity, not because of personal or political relationships. However, the appointment of ministers in Indonesia today often does not consider these competencies. Many ministerial positions are filled by individuals with political backgrounds rather than those with competence in the relevant fields.

***Keywords**: Hadith, Seeking Positions, Relevance*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana kualitas hadis larangan meminta jabatan dan relevansinya dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Islam adalah agama sekaligus ideologi. Adapun pemerintahan dan Negara bagian yang tidak dapat di pisahkan dari eksistensisnya. Perbedaan pendapat tentang negara dan pemerintahan dikalangan pemikir juga disebabkan oleh perbedaan perspektif mereka tentang esensi kedua konsep. Pemahaman terhadap hadis meminta jabatan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kerangka pemikiran Islam, mengingat Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga menetapkan tatanan sosial dan politik umatnya**.** Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian *library research.* Penelitian ini menyimpulkan Status hadis tentang larangan meminta jabatan Riwayat At Tirmidzi dalam kitab sunan At Tirmidzi nomor 7146 dari segi periwayatan nya hadis tersebut hadis Marfu' karena hadis tersebut bersumber dari periwayatan Rasulullah SAW, kemudian jika di lihat dari kriteria keshahihan suatu Hadis, maka hadis tersebut telah memenuhi kelima kriteria keshahihan suatu hadis. Oleh karena itu hadis

Riwayat At Tirmidzi tersebut di nilai shahih dan dapat di jadikan Hujjah, Adapun Relevansi nya ialah Pemikiran Ibnu Taimiyah yang terdapat di dalam kitab *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah* juga sejalan dengan hadis tentang larangan meminta jabatan. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya integritas dan kompetensi dalam kepemimpinan. Dia berargumen bahwa kepemimpinan seharusnya diberikan kepada orang yang memenuhi kriteria tertentu seperti kemampuan, kejujuran, dan ketakwaan, bukan kepada orang yang memintanya atau berambisi untuk mendapatkannya.

Kata Kunci: Hadis, Jabatan, Relevansi

A. Pendahuluan

Diskursus tentang pemimpin selalu hangat untuk diperbincangkan. Mengingat pembahasannya berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Pembicaraan tentang kepemimpinan tidak akan pernah selesai. Ia akan senantiasa ada selama manusia hidup di permukaan bumi ini. Masing-masing orang memiliki pendapat tentang pemimpin dan konsep kepemimpinan. Terlepas dari apakah pendapat mereka tersebut berdasarkan penelitian ilmiah atau hanya sekedar mendengar dari mulut ke mulut. Islam adalah agama sekaligus ideologi. Adapun pemerintahan dan Negara bagian yang tidak dapat di pisahkan dari eksistensisnya. Perbedaan pendapat tentang Negara dan pemerintahan dikalangan pemikir juga disebabkan oleh perbedaan perspektif mereka tentang esensi kedua konsep tersebut. Sebagian memandang bahwa keduanya Negara dan pemerintah berbeda secara konseptual, pemerintah adalah corak kepemimpinan dalam mengatur kepentingan orang banyak (berhubungan dengan metode atau strategi politik).[1]

Eksistensi pemimpin dalam Islam adalah perkara wajib, dan ulama telah menyepakati tentang hal tersebut. Pemimpin mempunyai peran dan tugas yang sangat besar, di mana peran dan tugas ini berhubungan dengan kehidupan dan kepentingan orang banyak, dunia, dan agama. Kepemimpinan adalah kebutuhan sosial. Pemimpin mempunyai peran yang sangat penting. Sebuah institusi, mulai dari yang terkecil sampai pada suatu Negara yang merupakan institusi terbesar, tidak akan stabil dan

[1] Inu Kencana Syafie, *Al-Qur'an Dan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

berjalan dengan baik tanpa adanya pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, maka tentulah negara tersebut akan menjadi lemah, tidak terarah, dan mudah terombang ambing oleh kekuatan luar yang ingin menguasai atau memporak porandakannya. Oleh karena itu, Islam mengatur hal ini lewat Alquran dan hadis Nabi Saw[2].

Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, dunia birokrasi menjadi salah satu pilar utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memastikan pelayanan publik yang efektif. Dalam konteks ini, peran individu yang menduduki jabatan-jabatan kunci di birokrasi sangat menentukan keberhasilan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, seringkali dalam upaya memperoleh posisi tersebut, terdapat dinamika kompleks yang melibatkan aspirasi personal, kepentingan politik, dan dampak sosial[3].

Dalam konteks kehidupan beragama, Islam sebagai ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk tata kelola pemerintahan, menyajikan pedoman etika dan moral bagi individu yang berkecimpung di dunia birokrasi. Dalam konteks ini, tindakan meminta jabatan atau posisi tertentu memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan keberlanjutan pemerintahan. Sebagai seorang muslim, tindakan ini juga harus dipertimbangkan dengan landasan etika dan moral yang diatur oleh ajaran Islam. Begitupun implementasi hadis tentang meminta jabatan dalam konteks dunia birokrasi, perlu diperhatikan bahwa hadis-hadis tersebut merupakan bagian penting dari sumber hukum Islam yang memberikan pedoman bagi perilaku umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pemerintahan.[4]

Hal ini tersirat dalam sabda Nabi Muhammad Saw:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ

[2] MT Muhammad Thaib, "Ketaatan Kepada Pemimpin Menurut Hadis Kitab Shahîh Al-Bukhâriy" (Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

[3] Utami, "Dinamika Kompleks Dalam Menduduki Jabatan Kunci Di Birokrasi: Studi Kasus Pada Proses Rekrutmen Pejabat Pemerintah.," *Jurnal Administrasi Publik*, 2019, 78–92.

[4] Yusuf, "Dampak Meminta Jabatan Dalam Persfektif Etika Islam Terhadap Kinerja Birokrasi," *Jurnal Kajian Islam*, 2020, 45–58.

Dari [Abdurrahman bin Samurah] mengatakan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadaku: “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada suatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik.”[Tirmidzi].

Pengaruh pemikiran Ibn Taymiyyah dapat dicerminkan oleh seberapa besar ketokohan intelektual para pengikutnya. Madjid Fakhry menyebutkan dua pemikir besar di dunia Islam yang sangat dipengaruhi oleh Ibn Taymiyyah, yakni Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Adapun bagi Nurcholis Madjid, pemikiran Ibn Taymiyyah menjadi sesuatu yang doktrinal bagi banyak sekali gerakan pembaruan Islam zaman modern, baik yang fundamentalistik maupun yang liberal. [5]

Dari sini, kemudian penulis berpandangan bahwa agar lebih meyakinkan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana relevansi hadis larangan meminta jabatan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan hadis larangan meminta jabatan dan pemikiran Ibnu Taimiyah. Dalam penelitian ini digunakan kajian ilmu *ma'anil hadis* untuk memahami hadis dan menghubungkannya dengan persoalan jabatan dalam kehidupan birokrasi.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Status Hadis Tentang Meminta Jabatan

Adapun hadis yang akan penulis takhrij dalam penelitian ini yaitu:

[5] Ahmad Gaus, “Api Islam Nurcholas Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner,” *Jakarta: PT Kompas Media Nusantara*, 2010, 147.

لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

Kemudian, penulis melakukan pelacakan keberadaan hadis tersebut dengan menggunakan kitab *Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Hadits An-Nabawi* karya A.J. Wensinck. Hasil pencarian hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

لا تسأل الإمارة فإنّك إن أوتيتها ... خ أيمان ١، ٦٠
كفارات ١٠، أحكام ٥، ٦، م أيمان ١٩،
ت نذور ٥، ن قضاة ٥، خم ٥، ٦٢••، ٦٣••

Dari hasil pencarian hadis melalui kitab tersebut, ditemukan bahwa hadis tersebut terdapat di dalam kitab *Mu'jam Al-Mufahras* jilid 2 halaman 380. Informasi dari kitab tersebut adalah hadis tersebut diriwayatkan oleh:

1. Imam Al-Bukhari dalam kitab shahihnya, *kitab Iman*, nomor bab 1; *kitab Kaffarat*, nomor bab 10; *kitab Ahkam*, nomor bab 5 dan 6.
2. Imam Muslim dalam kitab shahihnya, *kitab Iman*, nomor hadis 19.
3. Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, *kitab Nudzur*, nomor bab 5.
4. Imam An-Nasa'I dalam kitab sunannya, *kitab Qadhah*, nomor bab 5.
5. Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, juz 5 halaman 62 dan 63.

Analisis Kualitas dan Kuantitas Hadis

Dalam melakukan penelitian hadis, maka perlu adanya penulusuran terhadap keshahihan hadis. Maka ulama berpendapat penelitian sangantlah penting disebabkan untuk mengetahui apakah hadis tersebut masuk dalam kategori *maqbul* (diterima) atau *mardud* (ditolak). Dan ulama memberikan pendapat tentang keshahihan hadis itu mempunyai syarat yaitu sanad dan matannya berstatus *shahih*. Inilah mengapa penulis melakukan penulusuran tentang status hadis tentang kecintaan Nabi Muhammad SAW. terhadap tanah kelahirannya. Penulis mengutip perkataan yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi didalam bukunya "Metode Penulisan Hadis" karya Syuhudi Ismail yang mana beliau mengatakan, "Setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan

pokok agama, maka ketahuilah bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu"[6]

Mengutip perkataan dari Mahmud Thahhan di dalam kitabnya *Taisir Musthalah al-Hadis*, bahwa kualitas sanad hadis tersebut memilki 5 persyaratan untuk menjadi *shahih*, yaitu *ittishal as-sanad* (ketersambungan sanad), sanad yang meriwayatkan memiiki sifat *adil*, *dhabit*, tidak ada *syadz* dan *illat*. Setelah melihat beberapa syarat tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa hadis ini masuk dalam kategori *shahih* karena sudah memenuhi syarat keshahihan suatu hadis.

1) *Ittishal as-sanad* (ketersambungan sanad), dalan periwayatan hadis ini rantai sanadnya *muttashil* (bersambung) dari tabaqat *Mukharrij* sampai kepada Rasulullah.
2) Periwayatannya adil, memilki arti orang yang mukallaf, menjaga *Muru'ah*, tidak berbuar dosa yang berakibat fatal bagi dirinya, tidak berbuat zina maupun maksiat, tidak fasik apalagi untuk berbohong atas suatu hal, maka hal ini bisa dilihat melalui penilaian dari cendekiawan hadis mengenai jarh wa ta'dilnya. Setelah melakukan penelusuran periwayatan dalam hadis ini adil dalam berbagai tingkatan keadilannya, tetapi tidak ada yang sampai mendekati *jarh*.
3) Periwayat bersifat Dhabit, dari semua sanad dalam hadis tersebut adalah *Dhabit*, kecuali seorang perawi bernama Fudhail bin Sulaiman yang dinilai kurang *dhabit*.
4) Tidak ada *syadz* pada sanad dan matan hadis ini dan
5) Tidak ada *illa*t pada sanad dan matan hadis ini.

Meskipun ada perawi yang meriwayatkan hadis dengan menggunakan sighat tahammul wal 'ada *'an*, namun perawi tersebut dinilai tsiqah, tidak melakukan tadlis, serta saling bertemu antara murid dan guru sebagaimana yang tertulis di dalam *kitab Tahzibul Kamal*. Maka hadis ini berstatus shahih karena hadis tersebut telah memenuhi kelima syarat keshahihan suatu hadis. Secara kuantitas, hadis tersebut merupakan hadis *Gharib* karena hadis

[6] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2016).

ini diriwayatkan oleh satu orang perawi saja pada tingkatan shahabat, yaitu Abdurrahman bin Samurah RA.

Relevansi Hadis Larangan Meminta Jabatan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah

Hadis tentang larangan meminta jabatan terdapat dalam beberapa riwayat, diantaranya yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"*Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan! Sebab jika engkau diberi jabatan karena meminta, maka kamu akan dibiarkan mengurusnya sendiri. Tapi jika kamu diberi jabatan tanpa meminta, maka kamu akan dibantu dalam mengurusnya*." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menekankan bahwa meminta jabatan tidak dianjurkan dalam Islam karena bisa mengakibatkan seseorang tidak mendapat pertolongan Allah dalam menjalankan amanah tersebut. Selain itu, keinginan yang berlebihan terhadap jabatan bisa menimbulkan niat yang tidak tulus dan mengarah pada korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

Pemikiran Ibnu Taimiyah yang terdapat di dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah juga sejalan dengan prinsip ini. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya integritas dan kompetensi dalam kepemimpinan. Dia berargumen bahwa kepemimpinan seharusnya diberikan kepada orang yang memenuhi kriteria tertentu seperti kemampuan, kejujuran, dan ketakwaan, bukan kepada orang yang memintanya atau berambisi untuk mendapatkannya

Ibnu Taimiyah dalam kitab yang sama juga berpendapat bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat. Dia juga memperingatkan tentang bahaya pemimpin yang tidak kompeten dan tidak adil, yang dapat merusak tatanan sosial dan membawa kemudaratan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, relevansi antara hadis tentang larangan meminta jabatan dan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kitab *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah* terletak pada pentingnya prinsip kejujuran, kompetensi, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Keduanya menekankan bahwa kepemimpinan

harus diberikan kepada orang yang pantas dan bukan karena ambisi pribadi, untuk memastikan pemerintahan yang adil dan efektif.

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pemimpin haruslah mengangkat bahawahan atau asisten yang terbaik dan berkompeten di bidangnya. Beliau mengutip hadis tentang larangan meminta jabatan untuk menguatkan pendapat beliau mengenai pentingnya mengangkat jabatan dari orang yang ahli di bidangnya.

D. Kesimpulan

Status hadis tentang larangan meminta jabatan Riwayat At-Tirmidzi dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* nomor 7146 dari segi periwayatannya hadis tersebut adalah shahih karena jika dilihat dari kriteria keshahihan suatu hadis, maka hadis tersebut telah memenuhi kelima kriteria keshahihan suatu hadis. Oleh karena itu hadis Riwayat At-Tirmidzi tersebut di nilai shahih dan dapat dijadikan hujjah. Hadis tersebut menerangkan bahwa sebenarnya yang tidak diinginkan oleh Nabi saw. adalah sebuah jabatan dipangku atau dijabat oleh orang yang berambisi menduduki suatu jabatan, bahkan di hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa orang yang berambisi menduduki sebuah jabatan hanya akan mendapatkan kenikmatan di awal dan pada akhirnya akan menjadi penyesalan. Sedangkan orang yang memang layak menduduki jabatan tidak masalah jika ia memintanya. Beberapa ulama juga sepakat bahwa hadis ‘Utsman dapat dijadikan sebagai dalil kebolehan meminta jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Gaus. “Api Islam Nurcholas Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner.” *Jakarta: PT Kompas Media Nusantara*, 2010, 147.

Inu Kencana Syafie. *Al-Qur’an Dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Muhammad Thaib, MT. “Ketaatan Kepada Pemimpin Menurut Hadis Kitab Shahîh Al-Bukhâriy.” Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Syuhudi Ismail. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2016.

Utami. “Dinamika Kompleks Dalam Menduduki Jabatan Kunci Di Birokrasi: Studi Kasus Pada Proses Rekrutmen Pejabat Pemerintah.” *Jurnal Administrasi*

Publik, 2019, 78–92.

Yusuf. “Dampak Meminta Jabatan Dalam Persfektif Etika Islam Terhadap Kinerja Birokrasi.” *Jurnal Kajian Islam*, 2020, 45–58.